BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia berdasarkan citra-Nya sebagai laki-laki dan perempuan, yang ditakdirkan untuk menjadi pasangan dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Hal ini diharapkan agar keturunan tersebut dapat terus berkembang sesuai dengan kodrat manusia. Dalam hidup berpasangan, tujuan yang hendak dicapai adalah memiliki keturunan, dan untuk mewujudkan hal ini diperlukan pengesahan dalam bentuk ikatan perkawinan.¹

Perkawinan bukan sesuatu yang dilarang bahkan sangat dianjurkan oleh agama manapun sebab dengan perkawinan dapat menjadi suatu awal lahirnya generasi penerus baru untuk masa depan suatu Negara dan juga keluarga. Perkawinan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memelihara nilai dan kehormatan manusia beserta keturunannya supaya keturunan yang dihasilkan bertumbuh di lingkungan yang baik dan penuh cinta. Agama apapun yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus dilangsungkan dengan akad nikah dan didahului dengan suatu *ijab* atau pemberkatan secara agama dilaksanakan oleh tokoh agama yang bersangkutan tepat sesuai dengan ketentuan agama yang relevan.²

¹ Muhyidin dan Ayu Zahara, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Diponegoro Private Law* 4, No. 3 (2019): 9.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017): 49.

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia diatur oleh peraturan hukum yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, kemudian diperbaharui melalui UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan mengenai perkawinan tersebut secara yuridis formal berlaku untuk seluruh WNI tanpa terkecuali. Di dalam peraturan hukum tersebut diatur mengenai asas-asas, prinsip ini juga memberikan dasar hukum terkait dengan isu pernikahan yang dihadapi oleh penduduk Indonesia.³

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, terdapat penjelasan tentang makna perkawinan, yakni:

Perkawinan merupakan persatuan spiritual dan fisik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sah secara hukum sebagai suami dan istri, bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada pengertian perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa perkawinan terjadi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ikatan lahir yakni suatu hubungan yang secara formal dapat dilihat oleh publik menurut aturan perundang-undangan dan adanya hubungan tersebut menjadi pengikat bagi kedua pihak yang terikat dalam perkawinan dengan masyarakat. Ikatan batin merupakan relasi yang tidak resmi yang terbentuk karena adanya

³ Muhammad Hapli Amma, "Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* XI, No. 5 (2023): 1.

keinginan dari masing-masing mempelai yang kemudian mengikat kedua pihak tersebut.⁴

Dalam suatu peristiwa perkawinan, ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan antara WNI dengan WNA. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, membuat hubungan antar negara dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan zaman dahulu. Hal inilah yang mengakibatkan saat ini terdapat banyak pernikahan lintas negara antara WNI dengan WNA.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari website PerCA adalah organisasi khusus beranggotakan masyarakat yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini jumlah anggota dari PerCA Indonesia telah mencapai 8.000 anggota. Jumlah ini terus bertambah mengingat tidak semua pasangan perkawinan campuran mendaftarkan dirinya pada organisasi ini. Sehingga kemungkinan besar total keseluruhan masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan campur dapat berjumlah lebih dari 8.000 orang.⁶

Semakin marak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, membuat pemerintah kemudian menyusun suatu aturan hukum yang terkandung dalam UU Perkawinan mengatur mengenai pernikahan antar bangsa, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dari Pasal 57 hingga Pasal 63.

⁴ Endah Pertiwi, "Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Dan Harta Benda Yang Diperoleh Sebelum Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 2 (2019): 2.

⁵ Brian Adi Putra Permana, "Kepastian Hukum Harta Bersama Berupa Tanah dari Perkawinan Campuran Akibat Perceraian," *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 10 (2021): 1939.

⁶ Perca Indonesia, "Tentang Kami", <https://www.percaindonesia.com/tentang-kami/>, diakses pada 31 Juli 2023.

Menurut ketentuan Pasal 57, perkawinan campuran merujuk kepada ikatan pernikahan antara dua individu yang berasal dari Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan mereka, dengan salah satu dari mereka memiliki kewarganegaraan Indonesia.⁷

Berdasarkan uraian unsur tersebut, dapat diartikan bahwa tentang ide perkawinan campuran menitikberatkan pada perbedaan status kewarganegaraan, di mana minimal satu dari kedua mempelai harus memiliki kewarganegaraan Indonesia.⁸

Pelaksanaan pernikahan berdampak pada konsekuensi hukum yang melekat padanya, dan hal serupa berlaku dalam kasus pernikahan lintas negara. Terdapat beberapa konsekuensi hukum yang dapat timbul, yakni:

- (a) Pengaruh terhadap keterkaitan hukum antara pasangan suami dan istri;
- (b) Imbasnya pada aset dalam pernikahan;
- (c) Konsekuensi terkait status kewarganegaraan anak, hak-hak yang melekat, serta
- (d) Hubungan hukum dengan kedua orang tua mereka.

Adanya suatu perkawinan yang sah dan sakral di dalam setiap agama tidak dapat menutup kemungkinan terjadinya suatu perceraian yang di akibatkan adanya permasalahan internal antara suami istri maupun intervensi dari luar. Perceraian mengakibatkan terputusnya ikatan hukum antara suami dan istri, perkawinan bisa berakhir akibat salah satu pasangan meninggal dunia atau

⁷ Nina Ike Herawati, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah," *Jurnal Lex Suprema* III, No. 1 (2021): 519.

⁸ *Ibid.*

melalui proses perceraian. Dalam proses perceraian, berbagai aspek hukum dapat timbul terutama terkait dengan status kepemilikan harta perkawinan.

Dalam perkawinan campuran, Jika suami dan istri tidak melakukan pembagian harta sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan, sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengalami perubahan terhadap ketentuan Pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Dalam perkawinan campuran, salah satu isu hukum yang sering timbul adalah terkait dengan status kepemilikan tanah dan bangunan sebagai harta bersama.

Definisi dari harta bersama merupakan sebuah harta kekayaan yang didapatkan oleh suami ataupun istri pada saat selama masa perkawinan. Sebagaimana harta tersebut dikuasai bersama dan dalam tindakan hukum yang dilakukan wajib memerlukan persetujuan kedua belah pihak. UU Perkawinan tidak menguraikan secara jelas mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama, namun demikian telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa seluruh harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi yurisdiksi harta bersama. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah sebagai berikut :

“1. Harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung akan menjadi harta bersama dan tidak melihat atas nama siapa barang tersebut didaftarkan”. “2. Harta yang dibeli dan dibangun yang dibiayai dari harta

bersama akan menjadi yurisdiksi harta bersama walaupun dibangun atau dibeli setelah terjadinya perceraian”. “3. Seluruh harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan termasuk dalam yurisdiksi harta bersama.” “4. Penghasilan yang bersasal dari harta, bersama dan penghasilan yang pribadi baik suami maupun istri dalam perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama jika tidak terdapat pemisahan harta.”

UU Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan, yang termasuk harta benda perkawinan adalah sebagai berikut :

“1. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;” “2. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

J. Satrio berpendapat bahwa “Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan”.

Dalam UU Perkawinan, pengertian terhadap harta benda perkawinan tidak ditentukan secara eksplisit akan tetapi dari ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta benda perkawinan adalah seluruh harta benda yang dikuasai suami istri selama perkawinan berlangsung.

Dari apa yang diterangkan diatas dapat dicermati beberapa hal tentang harta bersama, antara lain ialah bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama, oleh suami ataupun istri dimulai pada awal perkawinan berlangsung, namun tidak menjadi sebuah harta bersama apabila kemudian terdapat sebuah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan tersebut.

Dalam perkawinan campuran, aset perkawinan yang dimiliki sebagai hak milik hanya terikat pada WNI yang menjadi pihak dalam perkawinan tersebut, dan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama. Seseorang dapat memperoleh kepemilikan atas aset tersebut melalui perjanjian pemisahan harta. Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika terjadi perceraian, di mana harta yang sebelumnya dianggap sebagai kepunyaan pribadi kemudian diidentifikasi sebagai harta bersama yang harus dibagi dalam proses pembagian harta gono-gini.

Dalam konteks ini, harta yang berstatus sebagai hak milik harus tetap dibagi sesuai dengan hak-hak yang sah dari setiap pihak atau keputusan yang diambil oleh pengadilan dalam proses yang sah. Warga Negara Asing tetap tidak diberikan hak milik atas harta tersebut..

Permasalahan tersebut terdapat dalam keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam contoh kasus yang dialami oleh Ano Warsono yang menikah dengan WNA Jerman yang bernama Sabrina Edith Ruth kemudian keduanya resmi bercerai pada tanggal 29 Juli 2003. Selanjutnya bapak Ano Warsono mengajukan gugatan kepada ibu Sabrina

Edith Ruth terkait dengan aset yang diperoleh selama ikatan perkawinan dimana selama perkawinan berlangsung mereka tidak menyebutkan pernah melakukan perjanjian pisah harta.

Dalam isi gugatan Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 358/Pdt.G/2019/PA.Dps. Ano Warsono (penggugat) mengajukan tuntutan terhadap Sabrina Edith Ruth (tergugat) untuk harta bersama (gono-gini) yang berupa sebidang tanah dengan sertipikat hak milik dan rumah di atasnya. Penggugat meminta harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan tersebut ditentukan sebagai hak penggugat. Penggugat kemudian bermaksud ingin menjual tanah dan rumah tersebut. Namun, hal yang dilakukan oleh penggugat bertentangan dengan aturan hukum yang ada sebelum adanya putusan pembagian harta bersama dari Pengadilan Agama Denpasar karena dari saat suami dan istri bercerai sampai akan diajukannya gugatan ini belum ada putusan pembagian harta bersama dari perkawinan mereka.

Menurut ketentuan hukum, bagi pasangan suami-istri yang merupakan Warga Negara Indonesia sudah barang tentu masing-masing berhak mendapat seperdua (1/2) dari harta bersama hasil perkawinan ketika terjadi perceraian. Namun, apakah ketentuan hukum itu berlaku sama dalam perkara ini jika tergugat bukan Warga Negara Indonesia melainkan Warga Negara Asing yang berasal dari Jerman?

Oleh karena kerumitan dalam uraian tersebut tentang kepemilikan harta dalam perkawinan, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan analisis hukum hakim guna mencari kejelasan hukum terkait dalam sebuah penelitian

berjudul “**STATUS KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah bagi WNA yang melakukan perceraian dalam perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan dan analisis hukum hakim dalam memutuskan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang status kepemilikan hak atas tanah bagi WNA yang melakukan perceraian dalam perkawinan campuran;
2. Untuk mampu menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan terhadap pasangan perceraian dalam perkawinan campuran di Pengadilan Agama Denpasar berdasarkan Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Memberikan pengetahuan baru di bidang hukum tentang kepemilikan tanah bagi WNI yang melakukan perceraian dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pra nikah;

- b. Memberikan kontribusi intelektual bagi komunitas akademisi mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan status kepemilikan properti dalam perkawinan lintas negara.
- c. Memberikan referensi terbaru yang berhubungan dengan kepemilikan harta bersama dalam perceraian pada perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian pra nikah.

2. Manfaat Praktis:

a. Untuk Penulis

Menjadi pengalaman baru bagi peneliti tentang adanya suatu aturan hukum yang berkaitan dengan perceraian dalam perkawinan campuran beserta harta bersama yang terkandung di dalamnya.

b. Untuk Para Mahasiswa/Mahasiswi

Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa dapat menerapkan teori yang dipelajari dalam kuliah untuk mengaplikasikannya dalam konteks praktis, terutama terkait dengan aspek hukum perkawinan dan hak kebendaan, khususnya dalam konteks perceraian pada perkawinan campuran.

c. Untuk Para Pasangan Perkawinan Campuran

Setelah adanya penelitian ini, para pasangan perkawinan campuran dapat lebih memahami mengenai kedudukan serta hak yang dimilikinya.

D. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini akan dilakukan uraian pembahasan dari segala permasalahan yang timbul supaya tidak pembahasan tersebut tetap berada pada jalurnya, akan dilakukan pembatasan berdasarkan beberapa definisi yang akan penulis gunakan nantinya. Uraiannya sebagai berikut :

1. Perkawinan campuran atau sering disebut juga perkawinan lintas negara atau internasional, adalah perkawinan yang melibatkan pasangan dari dua negara atau budaya yang berbeda. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perkawinan antara dua orang dengan latar belakang budaya, agama, atau negara yang berbeda. Perkawinan campuran sering kali memerlukan penyesuaian budaya, hukum, dan sosial bagi kedua pasangan serta keluarga mereka.⁹
2. Kepemilikan tanah merujuk pada hak yang dimiliki individu terkait dengan tanah dan struktur yang berdiri di atasnya. Ketika seseorang memiliki hak ini maka dirinya selaku pemilik berhak untuk berlaku apapun terkait tanah yang dimilikinya tersebut.¹⁰
3. Warga Negara Asing adalah individu yang memiliki kewarganegaraan dari suatu negara lain, bukan negara di mana mereka tinggal atau di mana mereka berada saat ini. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum negara yang mereka wakili..
4. Perceraian adalah proses hukum di mana suatu pernikahan secara resmi dan sah diakhiri, baik melalui tindakan dari salah satu atau kedua pasangan yang menikah atau melalui keputusan pengadilan. Ini mengakhiri status perkawinan secara hukum, yang sering kali melibatkan pembagian harta bersama, penentuan hak asuh anak, dan kewajiban finansial antara pasangan yang bercerai.¹¹

⁹ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Mhd. Yamin dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* (Bandung: Mandar Maju, 2018): 55.

¹¹ *Ibid.*

E. Landasan Teoretis

Berikut akan diuraikan beberapa teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini, berikut uraiannya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia. Tanpanya, pelaksanaan di tengah masyarakat akan menjadi tidak mungkin. Dalam konteks kepastian hukum, hukum memegang peranan sentral sebagai norma yang mengatur kehidupan sosial¹². Implementasi hukum dalam kehidupan sosial harus mengenakan sanksi kepada individu yang melanggar untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil dan teratur. Oleh karena itu, kejelasan norma hukum menjadi krusial untuk memastikan penerapan hukum yang efektif dalam konteks kehidupan bersama.¹³

Berikut adalah pandangan dari beberapa pakar yang berbeda mengenai kepastian hukum, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Apeeldorn menyajikan penjelasan tentang kepastian hukum sebagai berikut:¹⁴

1) Hukum merupakan hal yang rill

Keadilan dalam hukum merupakan hak yang wajib diperoleh oleh seluruh masyarakat yang mencari penegakan nilai-nilai keadilan.

¹² CST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2013): 385.

¹³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013): 26.

¹⁴ B. Arief Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: Refika Aditama, 2016): 82-83.

- 2) Kepastian hukum menandakan keberadaan keamanan bagi masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil yang mungkin dilakukan dari mereka yang menduduki posisi yang lebih tinggi. Apeeldorn menegaskan bahwa kepastian hukum harus diimplementasikan secara universal dan konsisten.

- b. Menurut Sudikno Mertokusumo

Tentang keyakinan bahwa sistem hukum dapat beroperasi secara konsisten dan efisien di masyarakat, kepastian hukum adalah suatu jaminan yang sangat penting. Meskipun terkait erat, kepastian hukum dan keadilan memiliki perbedaan yang mencolok. Kepastian hukum menekankan pada konsistensi dan prediktabilitas dalam pengaturan hukum, sementara keadilan melibatkan penilaian subjektif terhadap kasus-kasus individu.¹⁵

2. Teori Kepemilikan

Kepemilikan pada hal ini diidentikan dengan kepemilikan atas tanah. Menurut Eric T Freyfogle menyebutkan bahwa kepemilikan akan sesuatu hal penting untuk ada dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan beberapa keuntungan dimana pemilik memiliki keleluasaan untuk menikmati kebendaan miliknya tanpa diganggu oleh pihak lain. Keuntungan yang kedua berkaitan dengan pemilik dapat melakukan berbagai upaya untuk menghalangi pihak lain yang hendak menguasai

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 2014): 2.

obyek yang telah dimiliki oleh pemilik sah. Keuntungan yang ketiga adalah pemilik dapat mengalihkan obyek yang dimilikinya tersebut kepada pihak lain.¹⁶

Teori kepemilikan juga dikemukakan oleh Paton yang menyebutkan bahwa subyek hukum yang memiliki kepemilikan atas suatu obyek memiliki beberapa hak atas kebendaan miliknya, berupa:

- a. Pemilik dapat menikmati dan mengambil manfaat dari obyek yang sah menjadi miliknya;
- b. Hak untuk melarang pihak lain untuk menikmati obyek milik pemilik tersebut;
- c. Hak untuk membebani jaminan atas obyek tersebut;
- d. Termasuk pula memiliki hak untuk mewariskan obyek tersebut kepada keturunannya.¹⁷

John Locke juga berpendapat bahwa kepemilikan dapat diartikan sebagai seseorang dapat memiliki suatu kepemilikan atas benda apabila pemilik tersebut secara hukum, seseorang berhak untuk menghambat pihak lain dari mencabut atau melepaskan hak-hak yang diakui dalam suatu sistem kepemilikan. Ini mencerminkan adanya hak eksklusif untuk menikmati keuntungan dari kepemilikan, sementara tetap

¹⁶ A'an Efendi, "Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanahan Dalam Rangka Menggali Potensi Daerah," in *Prosiding Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Uiniversitas Janabdra, Yogyakarta, 2018, hal. 4.

¹⁷ *Ibid.*

mempertimbangkan hak yang tidak terlarang untuk memperoleh kebendaan yang dimiliki secara bersama-sama.¹⁸

F. Orisinalitas Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini berkenaan dengan kepemilikan tanah oleh WNA yang melakukan perceraian dalam perkawinan campuran yang mana tentu sudah ada beberapa yang mengkaji permasalahan yang serupa, oleh karena penulis yang juga punya ketertarikan untuk membahas penganalisisan terhadap putusan Pengadilan Agama Denpasar tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dengan merujuk pada literatur yang relevan yang telah mendiskusikan topik yang akan diangkat dalam skripsi ini:

1. Ahmad Maulana, **Percampuran Harta Bawaan menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah dalam Perkawinan Campuran.**

Berbeda dengan skripsi tersebut yang membahas Perjanjian Perkawinan untuk memisahkan Harta Bersama yang disepakati sebelum pernikahan, dalam skripsi penulis tidak ada penelitian terkait Perjanjian Pemisahan Harta dari awal pernikahan hingga perceraian terjadi.

Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan skripsi tersebut dengan mengadopsi metode penelitian yuridis empiris, sementara penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Penulis dalam skripsinya mengkaji berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum utama, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

¹⁸ *Ibid.*

serta Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing di Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

2. Pangestika Amanda Meta, **Pemisahan Harta Bersama di Masa Perkawinan (Studi Penetapan : Nomor 381/Pdt/P/2015/PN.TNG).**

Perbedaan antara skripsi di atas terletak pada fokus pembahasannya, dimana skripsi tersebut mengulas tentang Pemisahan Harta selama masa perkawinan, sedangkan skripsi yang saya tulis mengkaji Pemisahan Harta setelah perceraian terjadi. Pendekatan metodologi penelitian juga berbeda, dengan skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sementara saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Keduanya memiliki kesamaan dalam hasil yang dihasilkan, yaitu kedua skripsi tersebut menghasilkan putusan di mana majelis hakim mengabulkan permohonan untuk pemisahan harta, yang dilakukan karena ketidaktahuan para pemohon untuk membuat perjanjian pisah harta sebelum perkawinan. Namun, perbedaannya terletak pada skripsi yang penulis tulis, dimana terdapat kekeliruan dalam putusan hakim yang menetapkan harta yang merupakan hak milik menjadi harta bersama dalam suatu perkawinan campuran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum melibatkan berbagai metode yang mendasari analisisnya. Hasilnya digunakan sebagai referensi utama dalam menyimpulkan temuan serta memberikan rekomendasi, yang nantinya disampaikan kepada komite pengujian dalam ujian.¹⁹ Menurut Soetandyo, penelitian hukum terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif yang menganalisis berbagai aspek hukum untuk mengidentifikasi perubahan keadaan serta memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah, dan pendekatan empiris yang mengandalkan wawancara dengan narasumber sebagai basisnya.²⁰

Penelitian ini memilih pendekatan Yuridis Normatif untuk mendukung analisisnya dengan fokus utama pada penelitian kepustakaan yang didasarkan pada sumber sekunder atau bahan pustaka. Selain itu, penelitian ini juga akan mengintegrasikan berbagai asas hukum dan teori hukum relevan dalam analisisnya.²¹ Penelitian ini akan membahas mengenai hak kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah campuran setelah proses perceraian sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

2. Pendekatan Masalah

¹⁹ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: Social Politics Genius, 2017): 11.

²⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)* (Jakarta: Unigres, 2022): 70.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014): 19.

Berikut akan dijelaskan pendekatan penelitian yang akan dipergunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan yang akan diambil didasarkan pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Riset ini akan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer sebagai landasan analisisnya, yang kemudian akan diterapkan untuk menganalisis segala permasalahan yang timbul saat membahas masalah kepemilikan tanah WNA yang mengalami perceraian dalam perkawinan campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps).

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada setiap pandangan yang dilakukan oleh beberapa akademisi dan akan diakitkan dengan permasalahan yang timbul.²² Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan secara konsep mengenai status hukum kepemilikan tanah oleh WNA yang mengalami perceraian dalam perkawinan campuran yang diilustrasikan melalui studi kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini melibatkan analisis atau kajian mendalam terhadap keputusan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengeksplorasi status kepemilikan tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) yang

²² *Ibid*, hlm. 49

mengalami perceraian dalam perkawinan campuran, seperti yang dibahas dalam studi kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Berikut ini adalah dasar hukum yang akan dipergunakan dalam analisis, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PI-XIII/2015
- 5) Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum sekunder yang mendukung sumber hukum primer yang penulis gunakan untuk menjelaskan tentang sumber hukum primer, seperti yang terdapat dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian skripsi yang relevan, serta literatur dan publikasi terkini yang berkaitan dengan penelitian tentang status kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam konteks perceraian perkawinan

campuran, khususnya dalam analisis Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum lainnya yang akan digunakan oleh penulis bersumber dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia dalam mendukung bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan metode Library Research, yang merujuk pada studi pustaka yang berdasarkan pada sumber-sumber bacaan seperti buku, peraturan perundang-undangan, teori, prinsip-prinsip, dan bahan lain yang relevan untuk mempertimbangkan suatu isu yang dibaha²³. Bahan hukum yang akan diselidiki akan dipilih sesuai dengan rumusan masalah yang akan dianalisis secara menyeluruh masalah yang terkait dengan kepemilikan tanah WNA dalam konteks perceraian pada perkawinan campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps)

Sebelum menjalankan analisis hukum, bahan hukum yang dikumpulkan akan disusun dalam bentuk prinsip-prinsip, doktrin, atau elemen lain yang diperoleh, dan kemudian akan diproses secara sistematis untuk memfasilitasi analisis hukum dalam konteks riset ini.

5. Analisis Bahan Hukum

²³ *Ibid.*

Dalam suatu riset, terdapat praktik penggunaan berbagai literatur hukum yang telah dikoleksi dan kemudian digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang diselidiki. Dalam konteks analisis normatif, terdapat bahan hukum yang diperoleh dari berbagai studi, teori, prinsip, atau kaidah hukum yang telah dikompilasi dan dimanfaatkan untuk melakukan analisis yang bersifat deskriptif dan terstruktur.²⁴

Dalam konteks ini, penelitian akan mengadopsi pendekatan untuk menganalisis materi hukum dengan menjelaskan aspek-aspek yang terkait, serta menguraikan isu tersebut. Pendekatan analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi bahan hukum yang tentang status kepemilikan tanah WNA yang mengalami perceraian dalam perkawinan campuran (Studi Kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps).²⁵

Berikut akan diuraikan mengenai beberapa tahapan dalam melakukan analisis bahan hukum:²⁶

a. Inventarisasi Hukum

Merupakan suatu proses yang dilakukan pada awal analisis bahan hukum dimana pada tahapan ini akan dilakukan pengelompokan terhadap norma yang masuk kategori hukum maupun yang tidak termasuk norma hukum. Selanjutnya akan dilakukan tahapan inventarisasi dari beberapa norma yang masuk dalam kelompok norma hukum. Terakhir norma yang telah

²⁴ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum* (Semarang: Formaci, 2021): 208.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

dikelompokan tersebut akan digunakan sebagai landasan analisis sebuah penelitian hukum.

b. Interpretasi

Adalah salah satu metode dalam analisis bahan hukum dimana dalam tahapan ini akan dilakukan penjelasan terhadap teks undang-undang yang digunakan dalam penelitian dan dikaitkan dengan analisis penelitian pada penulisan hukum ini. Tujuan dilakukannya interpretasi adalah untuk menemukan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

c. Sistematisasi

Pada penelitian ini akan digunakan penafsiran hukum yang bersifat sistematis, yaitu penafsiran terhadap hukum merupakan elemen integral dari kerangka sistem hukum secara keseluruhan. Melakukan penafsiran hukum harus dilakukan secara sistematis, artinya tidak diperkenankan untuk keluar dari kerangka hukum yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi

Merupakan suatu pandangan, proporsisi dan pernyataan rumusan norma yang dilakukan peneliti setelah melakukan tahapan inventarisasi hukum hingga sistematisasi.

e. Penarikan Kesimpulan.

Setelah dilakukan seluruh tahapan dari awal hingga evaluasi, maka tahapan akhir dari analisis bahan hukum adalah penarikan kesimpulan yang akan dituangkan dalam analisis permasalahan pada penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Berikut adalah struktur skripsi ini yang disusun dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada dan akan dibahas di bab-bab berikutnya. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai materi tema yang akan dipelajari dalam karya ilmiah ini:

BAB I. Pendahuluan adalah bagian di mana penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat penelitian, menguraikan kerangka konseptual, mendeskripsikan metode penelitian, serta menyusun sistematika penulisan yang menjadi landasan untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

BAB II. Tinjauan secara menyeluruh mengenai status kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing yang mengalami perceraian dalam perkawinan campuran, bab ini membentuk kerangka teori untuk topik yang akan dibahas dalam bab berikutnya.

BAB III. Status kepemilikan tanah oleh warga negara asing setelah perceraian dalam perkawinan campuran dan analisis serta pertimbangan hakim (studi kasus Putusan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA.Dps) adalah bagian dari diskusi yang membahas contoh kasus serta analisis dasar pertimbangan hakim dalam pengadilan agama di Denpasar

BAB IV. Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat rangkuman dari temuan yang disajikan serta rekomendasi yang diajukan oleh penulis dalam karya ilmiah ini.